

PERJANJIAN KINERJA KPU 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harmain

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, Januari 2023

KETUA,

HARMAIN

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2023
KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	80%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	77%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
4	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi Serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2,8%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Rp. 8.704.013.000-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	Rp.11.594.948.000,-

Rp.20.298.961.000,-

Palangka Raya, Januari 2023


KETUA ,
HARMAIN

PERJANJIAN **KINERJA** 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 04 Palangka Raya

Telp. 0536-3224034

Fax. 0536-3224034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arief Suja'i
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Harmain
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

PIHAK KEDUA
KETUA,



PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%
4.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang di Reviu oleh Inspektorat	B
		Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan	WTP

		Tengah	
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	77%
7.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu.	100%
8.	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%
9.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
10.	Meningkatnya penyelesaian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%

Program	Anggaran
076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses	
Konsolidasi Demokrasi	
1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (3356)	Rp. 101.193.000,-
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363)	Rp. 17.190.000,-
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)	Rp. 215.000.000,-
4. Advokasi dan Sengketa Hukum (6638)	Rp. 29.588.000,-
5. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Rp. 10.173.343.000,-
6. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)	Rp. 524.987.000,-
7. Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Rp. 4.650.000,-
8. Masa Kampanye Pemilu (6870)	Rp. 189.166.000
9. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	Rp. 265.562.000,-
10. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Rp. 74.279.000,-
076.01.WA Program Dukungan Manajemen	
11. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Rp. 5.221.500.000,-
12. Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)	Rp. 10.000.000,-
13. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)	Rp. 34.320.000,-
14. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	Rp. 3.396.025.000,-
15. Data dan Informasi (6634)	Rp. 42.168.000,-

Rp. 20.298.961.000,-

Palangka Raya, Januari 2023

PIHAK KEDUA
KETUA,

HARMAIN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,

ARIEF SUJA'I